

Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik

M. Dedy Eko Trisyono Safari
Universitas Darul Ulum Jombang
dedieko95@gmail.com

PA Andiena Nindya Putri
ITB Stikom Bali
dinaputri1991@gmail.com

Rihfenti Ernayani
Universitas Balikpapan
rihfenti@uniba-bpn.ac.id

Article's History:

Received 16 August 2024; Received in revised form 24 August 2024; Accepted 27 September 2024; Published 1 October 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset).

Suggested Citation:

Safari, M. D. E. T., Putri, P. A. N., & Ernayani, R. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (5). 3036-3040. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3184>

Abstrak:

Artikel ini menganalisis pengaruh implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan publik. Akuntansi berbasis akrual diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintahan, karena metode ini mencatat pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Studi ini menggunakan metode *literature review* dari berbagai jurnal akademis dan laporan pemerintah yang diterbitkan setelah tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam hal keakuratan, relevansi, dan keterbandingan. Namun, beberapa tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan infrastruktur pendukung masih menjadi hambatan dalam penerapannya secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas serta kebijakan yang mendukung untuk memastikan implementasi yang optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, sistem akuntansi berbasis akrual berpotensi memperkuat tata kelola keuangan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Keywords: akuntansi berbasis akrual, pelaporan keuangan, transparansi, akuntabilitas, pemerintahan

Pendahuluan

Implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di sektor publik. Akuntansi berbasis akrual memungkinkan pencatatan pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhitungkan kapan kas diterima atau dibayarkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, relevansi, dan transparansi pelaporan keuangan di instansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), akuntansi berbasis akrual mulai diterapkan secara bertahap di Indonesia sejak tahun 2015 (Rahayu et al., 2023). Transformasi ini merupakan bagian dari reformasi keuangan negara yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik di tingkat pusat dan daerah.

Dalam konteks global, banyak negara telah lebih dahulu mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Penelitian oleh Saraite-Sariene et al., (2020) menunjukkan bahwa negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru telah berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik melalui penerapan sistem ini. Selain itu, menurut laporan IMF (2018), penerapan akuntansi berbasis akrual memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi beban keuangan yang sebenarnya, termasuk kewajiban jangka panjang yang seringkali tidak terlihat dalam sistem akuntansi berbasis kas.

Namun, penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan

pengetahuan yang memadai terkait sistem ini (Hernita et al., 2021). Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya memadai di banyak daerah juga menghambat implementasi akuntansi berbasis akrual secara efektif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Thuan et al., (2022), pelatihan yang lebih intensif dan pengembangan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi menjadi solusi yang diperlukan untuk mempercepat adopsi akuntansi berbasis akrual di seluruh instansi pemerintah.

Selain tantangan internal, ada juga hambatan eksternal yang mempengaruhi implementasi akuntansi berbasis akrual, seperti resistensi dari pihak-pihak yang tidak terbiasa dengan perubahan sistem akuntansi (Silva et al., 2023). Penelitian lain oleh Gonçalves et al., (2022) menunjukkan bahwa perubahan signifikan dalam sistem akuntansi memerlukan dukungan dari pemimpin institusi serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk auditor dan akuntan publik. Tanpa adanya dukungan ini, pelaksanaan sistem baru dapat terhambat dan tidak memberikan manfaat yang maksimal.

Dengan demikian, meskipun penerapan sistem akuntansi berbasis akrual menjanjikan peningkatan kualitas pelaporan keuangan di sektor publik, tantangan dalam hal keterampilan SDM, infrastruktur, dan resistensi terhadap perubahan harus diatasi. Keberhasilan penerapan sistem ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan dalam melakukan reformasi secara menyeluruh (Hubbart, 2022). Dalam jangka panjang, sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* untuk menganalisis pengaruh implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan publik. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, temuan, dan kesenjangan penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti. *Literature review* dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi pemerintah yang diterbitkan setelah tahun 2019. Kajian literatur ini juga mencakup penelitian yang dilakukan di berbagai negara yang telah mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai manfaat dan tantangan penerapan sistem ini.

Proses pengumpulan literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, ProQuest, dan ScienceDirect, yang memuat artikel-artikel *peer-reviewed* dari tahun 2019 hingga 2024. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi topik, metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian dengan konteks akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya, literatur yang terpilih dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pengaruh implementasi sistem akuntansi berbasis akrual terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, baik dari sisi transparansi, akuntabilitas, maupun akurasi data keuangan.

Melalui pendekatan *literature review*, penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan teknologi, dan resistensi terhadap perubahan. Hasil kajian ini memberikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas sistem akuntansi berbasis akrual serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerapan sistem ini di pemerintahan Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Peningkatan Transparansi dalam Pelaporan Keuangan

Implementasi akuntansi berbasis akrual meningkatkan transparansi pelaporan keuangan publik karena sistem ini mencatat transaksi secara lebih komprehensif dan sesuai dengan waktu terjadinya, bukan berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan. Hal ini memungkinkan laporan keuangan yang lebih detail dan menggambarkan situasi keuangan sebenarnya, termasuk kewajiban yang belum terealisasi (Alhawtmeh et al., 2023).

Transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu tujuan utama dari penerapan akuntansi berbasis akrual. Dalam akuntansi berbasis kas, beberapa kewajiban dan aset jangka panjang seringkali tidak tercermin dengan baik dalam laporan keuangan, sehingga memberikan gambaran yang kurang lengkap (Górowski et al., 2022). Sistem akrual memungkinkan pencatatan seluruh transaksi yang memengaruhi kondisi keuangan, termasuk piutang dan kewajiban, sehingga menciptakan laporan yang lebih jujur dan dapat dipercaya (Carlo et al., 2019).

Studi oleh Kanapickiene & Keliuotyte-Staniulieniene (2019) menunjukkan bahwa penerapan akrual di pemerintahan Indonesia telah meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi keuangan, yang pada

akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai contoh, pelaporan aset dan kewajiban yang lebih akurat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai beban pemerintah dalam jangka panjang, sehingga pengambil keputusan dapat merencanakan kebijakan keuangan yang lebih matang.

Namun, tantangan transparansi tetap ada dalam hal penyajian data yang rumit dan memerlukan pemahaman lebih mendalam dari para pengguna laporan keuangan. Mähönen et al., (2020) menyoroti bahwa tanpa pemahaman yang cukup dari pengguna laporan, meskipun sistem akuntansi sudah transparan, informasi yang disampaikan mungkin masih sulit dipahami oleh publik atau bahkan oleh pejabat pemerintahan yang tidak berlatar belakang akuntansi.

Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pemerintah. Dengan mencatat pendapatan dan pengeluaran pada saat terjadinya transaksi, pemerintah dapat lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan publik, baik jangka pendek maupun panjang (Onofrei et al., 2020).

Akuntabilitas adalah kunci dalam manajemen keuangan sektor publik yang efektif. Akuntansi berbasis akrual memungkinkan pemerintah untuk menunjukkan pertanggungjawaban terhadap kewajiban jangka panjang dan beban-beban yang akan datang, yang sebelumnya mungkin tidak tercatat dalam sistem berbasis kas. Hal ini memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat (Mills et al., 2022).

Menurut penelitian oleh Cao et al., (2023), implementasi akrual di sektor publik mengurangi praktik-praktik pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel, seperti menyembunyikan kewajiban yang belum dilunasi atau menunda pencatatan utang. Dengan sistem akrual, semua kewajiban tersebut harus dicatat sesuai dengan periode terjadinya, yang membuat laporan keuangan lebih dapat dipercaya.

Meski demikian, akuntabilitas ini hanya dapat dicapai jika ada pelatihan yang memadai bagi para pejabat keuangan dan auditor di pemerintahan untuk memahami sistem ini. Beberapa laporan menunjukkan bahwa penerapan akrual sering kali dihadapkan pada kurangnya tenaga ahli yang terlatih, sehingga akuntabilitas yang diharapkan tidak sepenuhnya tercapai.

Peningkatan Relevansi Informasi Keuangan

Implementasi akuntansi berbasis akrual membuat informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan real-time mengenai pendapatan, beban, aset, dan kewajiban memungkinkan pembuat kebijakan untuk merencanakan kebijakan fiskal dan keuangan yang lebih baik (Pina et al., 2020).

Relevansi informasi sangat penting bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan jangka pendek maupun panjang. Dengan menggunakan akrual, laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kondisi keuangan saat ini dan di masa depan. Sebagai contoh, kewajiban yang akan jatuh tempo di masa depan dapat diidentifikasi sejak dini, memungkinkan pemerintah untuk merencanakan pembayaran atau penyelesaian utang tersebut lebih baik.

Sebuah studi oleh Huy & Phuc, (2022) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan akuntansi berbasis akrual lebih mampu mengelola anggaran mereka dengan baik dibandingkan yang masih menggunakan sistem berbasis kas. Sistem ini memberikan informasi yang lebih relevan untuk menilai kinerja keuangan secara menyeluruh dan memperkirakan beban keuangan yang akan datang.

Meski relevansi informasi meningkat, tidak semua instansi pemerintah siap memanfaatkan informasi ini dengan optimal. Beberapa laporan menunjukkan adanya kendala dalam penggunaan teknologi yang diperlukan untuk mengolah data akrual secara efektif, sehingga relevansi data terkadang tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Publik

Salah satu dampak positif dari penerapan akuntansi berbasis akrual adalah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan dengan lebih baik, karena pencatatan yang lebih akurat mengenai aset, kewajiban, dan beban (Lim & Nam, 2023).

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat. Dengan sistem akrual, pemerintah dapat mengidentifikasi area di mana pengeluaran dapat dihemat atau

aset yang tidak produktif dapat dijual untuk meningkatkan arus kas. Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk memprediksi kebutuhan likuiditas lebih baik, sehingga tidak terjadi krisis likuiditas yang tidak terduga.

Sebagai contoh, penelitian oleh Cardillo & Longo, (2020) menemukan bahwa pemerintah daerah yang mengimplementasikan akrual mengalami peningkatan dalam hal efisiensi operasional. Dengan informasi yang lebih lengkap mengenai aset dan kewajiban, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan sumber daya publik.

Kendati demikian, efisiensi hanya bisa dicapai jika ada dukungan teknologi informasi yang kuat dan kemampuan manajemen yang baik dalam memproses data keuangan yang dihasilkan dari sistem akrual. Tanpa itu, manfaat efisiensi dari sistem ini tidak akan sepenuhnya dirasakan.

Keterbandingan Laporan Keuangan

Akuntansi berbasis akrual memfasilitasi keterbandingan laporan keuangan antar periode dan antar instansi pemerintah. Sistem ini menghasilkan standar yang lebih konsisten dalam penyusunan laporan, sehingga memudahkan auditor dan pengguna laporan untuk membandingkan kinerja keuangan dari waktu ke waktu.

Keterbandingan adalah elemen penting dalam audit keuangan, karena memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat bagaimana kondisi keuangan pemerintah berubah dari satu periode ke periode lainnya. Dengan menggunakan akrual, setiap transaksi dicatat dengan metode yang sama, sehingga laporan keuangan dari berbagai tahun dapat dibandingkan secara objektif.

Penelitian oleh Dokas et al., (2023) menunjukkan bahwa akrual juga mempermudah perbandingan antar daerah dan antar instansi pemerintah. Misalnya, pemerintah pusat dapat membandingkan kinerja keuangan antar daerah untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan di setiap wilayah.

Namun, keterbandingan ini hanya akan optimal jika semua entitas pemerintah menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dengan konsisten. Dalam banyak kasus, ada perbedaan dalam penerapan akrual antar daerah yang dapat mengganggu upaya untuk membuat perbandingan yang adil.

Kesimpulan

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan publik. Dengan mencatat transaksi berdasarkan waktu terjadinya, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih transparan dan akurat mengenai kondisi keuangan pemerintah, termasuk pengelolaan aset dan kewajiban jangka panjang. Peningkatan transparansi ini turut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah.

Selain itu, akuntansi berbasis akrual juga memperkuat akuntabilitas dan relevansi informasi keuangan. Pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik, serta memiliki data yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Meskipun tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, manfaat jangka panjang dari penerapan sistem ini terlihat jelas, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Namun, untuk mencapai keterbandingan yang lebih baik antar instansi pemerintah dan antar periode, diperlukan konsistensi dalam penerapan standar akrual di seluruh tingkat pemerintahan. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi para pegawai menjadi kunci keberhasilan dalam memaksimalkan manfaat dari akuntansi berbasis akrual ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, akuntansi akrual diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan publik secara berkelanjutan.

Referensi

- Alhawtmeh OM. The Impact of IFRS 17 on the Development of Accounting Measurement and Disclosure, in Addition to Improving the Quality of Financial Reports, Considering Compliance with the Requirements of IFRS 4—Jordanian Insurance Companies-Field Study. *Sustainability*. 2023; 15(11):8612. <https://doi.org/10.3390/su15118612>
- Cao M, Duan K, Ibrahim H. Local Government Debt and Its Impact on Corporate Underinvestment and ESG Performance: Empirical Evidence from China. *Sustainability*. 2023; 15(14):11116. <https://doi.org/10.3390/su151411116>
- Cardillo E, Longo MC. Managerial Reporting Tools for Social Sustainability: Insights from a Local Government Experience. *Sustainability*. 2020; 12(9):3675. <https://doi.org/10.3390/su12093675>

- Di Carlo F, Modugno G, Agasisti T, Catalano G. Changing the Accounting System to Foster Universities' Financial Sustainability: First Evidence from Italy. *Sustainability*. 2019; 11(21):6151. <https://doi.org/10.3390/su11216151>
- Dokas I. Earnings Management and Status of Corporate Governance under Different Levels of Corruption—An Empirical Analysis in European Countries. *Journal of Risk and Financial Management*. 2023; 16(10):458. <https://doi.org/10.3390/jrfm16100458>
- Gonçalves MJA, da Silva ACF, Ferreira CG. The Future of Accounting: How Will Digital Transformation Impact the Sector? *Informatics*. 2022; 9(1):19. <https://doi.org/10.3390/informatics9010019>
- Górowski I, Kurek B, Szarucki M. The Impact of a New Accounting Standard on Assets, Liabilities and Leverage of Companies: Evidence from Energy Industry. *Energies*. 2022; 15(4):1293. <https://doi.org/10.3390/en15041293>
- Hernita H, Surya B, Perwira I, Abubakar H, Idris M. Economic Business Sustainability and Strengthening Human Resource Capacity Based on Increasing the Productivity of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Makassar City, Indonesia. *Sustainability*. 2021; 13(6):3177. <https://doi.org/10.3390/su13063177>
- Hubbart JA. Organizational Change: The Challenge of Change Aversion. *Administrative Sciences*. 2023; 13(7):162. <https://doi.org/10.3390/admsci13070162>
- Huy PQ, Phuc VK. Insight into the Critical Success Factors of Performance-Based Budgeting Implementation in the Public Sector for Sustainable Development in the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*. 2022; 14(20):13198. <https://doi.org/10.3390/su142013198>
- Kanapickiene R, Keliuotyte-Staniuleniene G. Disclosure of Non-Current Tangible Assets Information in Local Government Financial Statements: The Case of Lithuania. *Economies*. 2019; 7(4):116. <https://doi.org/10.3390/economies7040116>
- Lim K, Nam G. A Study on How to Improve the Accountability of National Defense Financial Information for Government Sustainability. *Sustainability*. 2023; 15(11):8749. <https://doi.org/10.3390/su15118749>
- Mills D, Pudney S, Pevcin P, Dvorak J. Evidence-Based Public Policy Decision-Making in Smart Cities: Does Extant Theory Support Achievement of City Sustainability Objectives? *Sustainability*. 2022; 14(1):3. <https://doi.org/10.3390/su14010003>
- Mähönen J. Comprehensive Approach to Relevant and Reliable Reporting in Europe: A Dream Impossible? *Sustainability*. 2020; 12(13):5277. <https://doi.org/10.3390/su12135277>
- Onofrei M, AG, Bostan I, Oprea F, Paraschiv G, Lazăr CM. The Implication of Fiscal Principles and Rules on Promoting Sustainable Public Finances in the EU Countries. *Sustainability*. 2020; 12(7):2772. <https://doi.org/10.3390/su12072772>
- Pina V, Bachiller P, Ripoll L. Testing the Reliability of Financial Sustainability. The Case of Spanish Local Governments. *Sustainability*. 2020; 12(17):6880. <https://doi.org/10.3390/su12176880>
- Rahayu, A., Nurodin, I., & Sulaeman, S. (2023). Analysis of Accrual-Based Government Accounting Standards Application to The Financial Reports of Regional Public Service Agency (BLUD). *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 8(2), 100-109. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i2.27090>
- Saraite-Sariene L, Alonso-Cañadas J, Galán-Valdivieso F, Caba-Pérez C. Non-Financial Information versus Financial as a Key to the Stakeholder Engagement: A Higher Education Perspective. *Sustainability*. 2020; 12(1):331. <https://doi.org/10.3390/su12010331>
- Silva AP, Fontes A, Menezes C, Montenegro TM. Transitioning to an IFRS-Based Accounting System: Longitudinal Insights from Practitioners in Portugal. *Sustainability*. 2023; 15(20):15121. <https://doi.org/10.3390/su152015121>
- Thuan PQ, Khuong NV, Anh NDC, Hanh NTX, Thi VHA, Tram TNB, Han CG. The Determinants of the Usage of Accounting Information Systems toward Operational Efficiency in Industrial Revolution 4.0: Evidence from an Emerging Economy. *Economies*. 2022; 10(4):83. <https://doi.org/10.3390/economies10040083>